

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian yang telah dicapai Indonesia pada saat ini, merupakan hasil dari pembangunan yang terus menerus dan secara simultan dilakukan, sehingga membuat dunia keuangan, dan bisnis di Indonesia semakin semarak, kompleks, bervariasi, dan dinamis. Dengan adanya kondisi tersebut, maka persaingan di dunia bisnis, keuangan, juga turut menjadi semakin tajam, sehingga masing-masing perusahaan atau organisasi dengan serius dan maksimal, berusaha menjadi yang lebih unggul didandingkan para pesaingnya dengan cara memaksimalkan segala bentuk potensi dan kemampuan yang ada pada tubuh perusahaan atau organisasi tersebut. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen, dan tetap eksis di segala jaman dalam melangsungkan kegiatan bisnis, perusahaan, atau kegiatan keuangan lainnya.

Bersamaan dengan perkembangan tersebut, berbagai masalah dinamika dan struktur ekonomi mulai muncul ke permukaan. Sebagai contoh, banyak pakar mulai memalingkan pikirannya pada sumber daya manusia yang selama ini baru sedikit terjamah. Hal ini tentu tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang memang menuntut kualifikasi sumber daya manusia yang lebih dari

sebelumnya. Pembuat kebijakan ekonomi, dunia usaha, dan masyarakat ditantang untuk segera membuat terapi sesuai dengan bidang usahanya agar perkembangan ekonomi dan eksistensinya tidak terhambat oleh perusahaan lain. Menurut Asmah *et al.* (2020) menyatakan bahwa, tindakan kecurangan tidak dapat dihindari oleh semua perusahaan dengan tujuan untuk memanfaatkan kondisi perekonomian yang sedang berlangsung.

Laporan keuangan ialah sarana komunikasi antara pengguna dengan entitas penerbit. Untuk dapat memberikan informasi keuangan yang tepat kepada publik, laporan keuangan harus bebas dari *fraud*. *Fraud* atau kecurangan yang disengaja terkait transaksi keuangan dalam suatu entitas menjadi urgensi untuk dapat diambil tindakan preventif dalam korektif sehingga *fraud* itu sendiri tidak terulang. Untuk itu, peneliti bertujuan memperkaya literasi terkait proksi dan indikator penilaian *fraud* laporan keuangan entitas. Banyak penelitian yang telah dilakukan terkait ini. Namun, Virus corona menyebar atau covid-19 telah menyebar luas secara global hampir ke seluruh negara sejak Desember 2019 dan sudah menyebabkan berbagai kasus orang terkonfirmasi virus dan kematian yang terus bertambah di seluruh dunia. Pandemi covid di Indonesia sendiri pertama muncul pada tanggal 2 maret 2020 dan terus bertambah hingga tanggal 30 oktober 2020. Akibat dari kondisi pandemi covid-19 ini telah menimbulkan kondisi krisis dan

berdampak kepada berbagai aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya. Menyikapi hal tersebut pemerintah dan lapisan unsur masyarakat melakukan tindakan maksimal untuk meminimalisir penyebaran covid-19.

Pada bulan maret 2020 dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Presiden RI di Istana Bogor menghimbau agar seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan *social distancing* yang diikuti oleh berbagai kebijakan pemerintah. Dengan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pelarangan berkerumun dan kegiatan tatap muka sehingga beberapa organisasi atau perusahaan dan Lembaga pemerintahan mulai bekerja dari rumah (*work from home*). Beberapa industri perusahaan ada yang tetap beroperasi dengan menetapkan protokol pencegahan covid-19 sesuai dengan kebijakan pemerintah. Situasi tersebut secara tidak langsung sangat berdampak kepada buruknya kondisi ekonomi dikarenakan banyaknya pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan turunnya daya beli masyarakat.

Kondisi ekonomi yang semakin buruk dan lemahnya pengawasan serta teralihkannya fokus perusahaan dalam menghadapi krisis pandemic covid-19 membuka peluang bagi pelaku kecurangan (*fraud*) dalam perusahaan dan memanfaatkan kondisi untuk melakukan Tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan. Menurut liputan6 (2020) para pemimpin korporasi dan institusi

perusahaan mengungkapkan bahwa disaat perusahaan berupaya untuk mempertahankan operasional dan keberlangsungan usahanya justru kejadian kecurangan dan siber seperti pencurian data sebagai akibat dari penggunaan teknologi informasi yang semakin gencar pada saat melakukan *work from home* agar operasional perusahaan dapat terus berjalan. Kecurangan dapat diartikan tindakan yang dilakukan tidak beretika yang merugikan pihak lain dan memberikan keuntungan bagi pihak tertentu. Pada lingkungan bisnis dapat diartikan sebagai suatu rekayasa atau kebohongan yang disengaja, melaporkan asset perusahaan secara tidak benar atau memanipulasi data atau pencatatan yang dapat merugikan perusahaan. Kecurangan tidak cukup dengan hanya melakukan pencegahan tapi kecurangan tersebut dapat dideteksi sedini mungkin.

Namun sebagaimana yang dialami negara-negara maju maupun negara berkembang, setiap pencapaian kemampuan di bidang ekonomi cenderung diiringi pula dengan munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru. Kejahatan baru tersebut mempunyai cara dan metode yang baru dan beragam pula. Seperti kita banyak dikejutkan dengan munculnya berbagai jenis manipulasi baru, khususnya dalam dunia usaha. Jenis manipulasi yang paling sering ditemui dalam suatu entitas adalah kecurangan. Penyakit berdimensi ekonomi, politik, kultur, etika, moral, bahkan agama, yang kini menggerogoti segala aspek kita saat ini adalah kecurangan dalam bentuk korupsi, kolusi,

dan nepotisme (KKN).

Laporan keuangan memberikan segala informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, bagaimana kinerja perusahaan selama ini, serta bagaimana arus kas entitas perusahaan yang berguna bagi para pihak yang berkepentingan. Tujuan perusahaan menerbitkan laporan keuangan sesungguhnya ingin menampilkan keadaan perusahaan yang terbaik. Namun, motivasi tersebut dapat menyebabkan Tindakan kecurangan pada laporan keuangan yang dilakukan perusahaan. Tindakan kecurangan pada laporan keuangan tersebut menyebabkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan menjadi tidak relevan dan menyebabkan salah saji yang dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Ketika perusahaan menyajikan informasi yang tidak material, maka informasi keuangan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi karena analisis yang dilakukan tidak berdasarkan informasi yang sebenarnya (Martantya dan Daljono, 2013).

Kecurangan (*fraud*) merupakan kesalahan penyajian dari fakta material yang dibuat oleh salah satu pihak ke pihak yang lain dengan niatan untuk menipu dan menyebabkan pihak lain yang mengandalkan fakta tersebut mengalami kerugian. Tindakan pemanipulasian laporan keuangan ini adalah salah satu bentuk Tindakan kecurangan atau *fraud*.

Kecurangan (*fraud*) laporan keuangan merupakan kesengajaan ataupun kelalaian dalam pelaporan laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Menurut Wells, 2011 (dalam Sihombing, 2014) kecurangan laporan keuangan mencakup beberapa modus, antara lain:

1. Pemalsuan, perubahan, atau manipulasi catatan keuangan (*financial record*), dokumen pendukung atau transaksi bisnis.
2. Penghilangan yang disengaja atas peristiwa, transaksi, akun, atau informasi signifikan lainnya sebagai sumber dari penyajian laporan keuangan.
3. Penerapan yang salah dan disengaja terhadap prinsip akuntansi, kebijakan, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur, mengakui, melaporkan dan mengungkapkan peristiwa ekonomi dan transaksi bisnis.
4. Penghilangan yang disengaja terhadap informasi yang seharusnya disajikan dan diungkapkan menyangkut prinsip dan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam membuat laporan keuangan.

Fraud kini diilustrasikan seperti ulat yang menggerogoti daun tanaman, hingga akhirnya tanaman tersebut layu dan mati. *Fraud* tidak hanya merusak rantai kepercayaan antara manajemen dan investor namun juga menciderai nilai-nilai dari akuntansi itu sendiri (Sihombing, 2014).

Kasus-kasus mengenai skandal *fraud* laporan keuangan saat ini sudah banyak ditemukan pada perusahaan-perusahaan baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Contoh kasus *fraud* laporan keuangan yang terjadi pada perusahaan raksasa Inggris yaitu British Telecom. KPMG telah berhasil mendeteksi adanya *fraud* laporan keuangan pada perusahaan besar multinasional British Telecom di Italia. Sebagaimana skandal *fraud* akuntansi lainnya, *fraud* yang terjadi di British Telecom berdampak kepada akuntan publiknya. Tidak tanggung-tanggung, kali ini yang terkena dampaknya adalah *Price Waterhouse Coopers* (PwC) yang merupakan kantor akuntan public ternama di dunia dan termasuk *the bigfour*. Tentu saja dampak *fraud* akuntansi ini bukan saja menyebabkan reputasi kantor akuntan public tersebut tercemar, namun ikut mencoreng profesi akuntan public. Padahal eksistensi akuntan publik sangat tergantung pada kepercayaan public kepada reputasi profesional akuntan public. British Telecom segera mengganti PwC dengan KPMG. KPMG juga merupakan *file bigfour*. Modus *fraud* akuntansi yang dilakukan oleh British Telecom di Italia sebenarnya relative sederhana dan banyak dibahas di literatur kuliah *auditing*. Namun, banyak *auditor* yang gagal mendeteksinya yaitu melakukan inflasi (peningkatan) atas laba perusahaan selama beberapa tahun dengan cara tidak wajar melalui Kerjasama kopuratif dengan klien-klien perusahaan dan jasa keuangan. Modusnya adalah

membesarkan penghasilan perusahaan melalui perpanjangan kontrak yang palsu dan *invoice*-nya serta transaksi yang palsu dengan *vendor*. Praktik kecurangan ini sudah terjadi sejak tahun 2013. Dorongan untuk memperoleh bonus (*tantiem*) menjadistimulus *fraud* akuntansi ini. Dampak *fraud* akuntansi ini menyebabkan British Telecom harus menurunkan GBP530 juta untuk membayar utang-utang yang disembunyikan (tidak dilaporkan). Tentu saja British Telecom rugi membayar pajak penghasilan atas laba yang sebenarnya tidak ada. Skandal *fraud* akuntansi ini, sebagaimana biasanya berdampak pada kerugian kepada pemegang saham dan investor dimana harga saham British Telecom anjlok seperlimanya. Ketika British Telecom mengumumkan koreksi pendapatannya sebesar GBP350 juta dibulan Januari 2017 (Sumber: WE Online).

Kasus *fraud* laporan keuangan lainnya adalah kasus PT Bank Bukopin Tbk. Penyebab terjadinya *fraud* laporan keuangan PT Bank Bukopin Tbk adalah beberapa variabel dalam laporan keuangan tersebut banyak mencatatkan perubahan signifikan. Laba perusahaan tahun 2016 misalnya tercatat sebesar Rp. 183,53 miliar dalam laporan keuangan perusahaan di tahun 2017, perusahaan ini mencatatkan pendapatan sebesar Rp. 1,086 triliun. Tidak hanya variabel laba saja, beberapa variabel lain juga mencatatkan perubahan yang cukup signifikan di antaranya pada total pendapatan

bunga dan syariah dan lain sebagainya. Dalam catatan 51 laporan keuangan BBKP, perusahaan tersebut memberikan dua alasan adanya penyajian Kembali laporan keuangan kondilasi perusahaan tersebut. Yang pertama, adalah adanya piutang kartu kredit bank yang disebabkan oleh modifikasi kartu kredit tertentu. Kedua adalah soal pembiayaan atau piutang syariah BSB terkait dengan penambahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai debitor tertentu. BBKP dalam pernyataannya di laporan keuangan 2017 tersebut juga mengatakan bahwa akan mengambil Langkah- langkah yang diperlukan untuk menangani isu modifikasi data kartu kredit tersebut yang ada di atas (Sumber: Kompas.com).

Adapun kasus lainnya, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengklaim mencatatkan kinerja keuangan cemerlang pada 2018 lalu, dengan laba bersih US\$ 809 ribu atau sekitar Rp 11,33 miliar. Namun dua komisaris perusahaan menolak menandatangani laporan keuangan karena menduga ada kejanggalan pencatatan transaksi demi memoles laporan keuangan tahunan 2018. Dua komisaris tak sepakat dengan salah satu transaksi kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi, perusahaan rintisan (startup) penyedia teknologi wifi on board, yang dibukukan sebagai pendapatan oleh manajemen. Mahata bekerja sama secara langsung dengan PT Citilink Indonesia, anak usaha Garuda Indonesia yang dianggap menguntungkan hingga US\$ 239,9 juta. Dalam kerja sama itu, Mahata berkomitmen

menanggung seluruh biaya penyediaan, pemasangan, pengoperasian, dan perawatan peralatan layanan konektivitas. Pihak Mahata sebenarnya belum membayar sepeserpun dari total kompensasi yang disepakati hingga akhir 2018, namun manajemen tetap mencatat laporan itu sebagai pendapatan kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat. Sampai pada akhirnya, laporan keuangan Garuda Indonesia menorehkan laba bersih. Namun, hal itu terendus oleh pihak regulator. Pada akhirnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan peringatan tertulis III dan mengenakan denda sebesar Rp 250 juta kepada Garuda Indonesia, serta menuntut perusahaan untuk memperbaiki dan menyajikan laporan keuangan. Tak hanya itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan denda masing-masing sebesar Rp 100 juta kepada Garuda Indonesia dan seluruh anggota direksi. OJK juga mewajibkan perusahaan untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan 2018. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP), OJK membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama 1 tahun kepada KAP Kasner Sirumapea. Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga membekukan izin terhadap AP Kasner Sirumapea selama 12 bulan. Skandal keuangan yang dialami Garuda Indonesia ini merupakan contoh kasus kecurangan laporan keuangan atau fraud jenis *Fraudulent Statements*.

Dan juga baru-baru ini Bursa Efek Indonesia (BEI) dikejutkan

dengan adanya dugaan manipulasi laporan keuangan tahunan (LKT) tahun 2019 yang menerpa salah satu emiten di bidang jasa dan perdagangan di bidang teknologi informasi, PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY) dan anak usahanya. Dalam surat keterangan yang terbit di keterbukaan informasi, ENVY menjelaskan duduk perkara terkait dengan dugaan adanya manipulasi atas laporan keuangan (lapkeu) anak usahanya, PT Ritel Global Solusi (RGS) tahun 2019. Laporan keuangan 2019 RGS itu kemudian dikonsolidasikan ke laporan keuangan tahunan ENVY tahun 2019. RGS adalah anak usaha ENVY dengan porsi kepemilikan 70% yang bergerak bidang jasa perdagangan dengan berbasis online melalui aplikasi "KO-IN". ENVY juga menyebutkan bahwa pihak manajemen saat ini tidak mengetahui secara pasti proses yang dilakukan saat itu sehingga munculnya laporan konsolidasi tersebut. Menanggapi hal tersebut, manajemen ENVY mengatakan saat ini sedang meminta klarifikasi ke pihak auditor atas beberapa keraguan termasuk laporan keuangan RGS. Perseroan akan mengklarifikasi permasalahan LK ini dengan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan selaku akuntan publik pada saat itu. BEI hingga kini belum memberikan pernyataan resmi ketika dihubungi mengenai perkara ini, termasuk OJK.

Melihat banyaknya fenomena *fraud* laporan keuangan yang terjadi dan menimbulkan kerugian di berbagai pihak, maka auditor

memiliki peranan penting untuk mendeteksi adanya *fraud* dalam laporan keuangan. Standar Auditing Seksi 316 2001 (PSA No. 70, 2001) menyatakan bahwa auditor tidak dapat memperoleh keyakinan bahwa salah saji material dalam laporan keuangan dapat terdeteksi, termasuk salah saji material sebagai akibat dari *fraud*. Audit harus secara khusus menaksir resiko salah saji material dalam laporan keuangan sebagai akibat *fraud* dan harus mempertimbangkan taksiran resiko ini dalam mendesain prosedur audit yang akan dilaksanakan. Saat melakukan penafsiran ini, auditor harus mempertimbangkan faktor resiko kecurangan yang berdasarkan pada teori *fraud triangle* oleh Cressey.

Cressey (1953) dalam Tuannakotta (2010), menyatakan bahwa *fraud triangle* adalah segitiga kecurangan yang menggambarkan adanya tiga kondisi penyebab terjadinya penyalahgunaan asset dan kecurangan laporan keuangan. Tiga kondisi tersebut adalah tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).

Menurut Martantya dan Daljono (2013) *pressure* adalah dorongan orang untuk melakukan *fraud*. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain, termasuk hal keuangan dan non keuangan. Dalam hal ini keuangan sebagai contoh dorongan untuk memiliki barang-barang yang bersifat materi. Tekanan dalam hal non keuangan mendorong

seseorang melakukan kecurangan, misalnya Tindakan untuk menutupi kinerja yang buruk karena tuntutan pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang baik.

Menurut Kartika (2014) kesempatan terbentuk melalui peluang yang memungkinkan seseorang melakukan kecurangan (*fraud*). Biasanya disebabkan karena lemahnya pengendalian internal suatu organisasi misalnya kurangnya pengawasan dan/atau penyalahgunaan wewenang. Di antara tiga elemen *fraud triangle*, kesempatan merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, control dan upaya deteksi dini terhadap *fraud*.

Skousen *et al.*, (2009) menyatakan bahwa salah satu elemen penting terjadinya *fraud* yaitu rasionalisasi di mana pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya. Rasionalisasi merupakan bagian dari *fraud triangle* yang paling sulit diukur. Rasionalisasi dapat dikatakan sebagai sifat, karakter, atau pemikiran seseorang sebagai pembenaran atas tindak yang ia lakukan. Contohnya adalah pelaku telah lama bekerja di perusahaan dengan indeks kerja yang sangat baik dan menginginkan intensif yang lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang ia terima sehingga ia berpikir jika melakukan sedikit kecurangan, perusahaan akan memakluminya.

Teori ini telah diadopsi dalam standar auditing dan dianggap sebagai salah satu literatur utama dalam menjelaskan fenomena

fraud laporan keuangan. Di samping fenomena *gap* yang terjadi di atas, kemampuan teori tersebut dalam menjelaskan fenomena *fraud* laporan keuangan belum banyak terbukti secara empiris. Hal ini disebabkan karena adanya ketidak konsistenan antara hasil pengujian peneliti satu dengan yang lain.

Hasil penelitian *fraud* laporan keuangan masih banyak menghasilkan temuan yang tidak konsisten, sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai *fraud* laporan keuangan dan *fraud triangle* untuk mengetahui konsistensi temuan. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi dan variabel-variabel dari *fraud triangle* ini tidak dapat begitu saja diteliti sehingga membutuhkan proksi variabel. Proksi yang dapat digunakan untuk penelitian ini antara lain *pressure* yang diproksikan dengan *financial stability*, dan *external pressure*. *Opportunity* yang diproksikan dengan *effective monitoring*. *Rationalization* yang diproksikan dengan *rationalization*. Ketiga faktor tersebut menjadi pemicu terjadinya peningkatan *fraud*, terutama pada beberapa tahun terakhir. Keinginan perusahaan agar operasional perusahaan terjamin kesinambungannya menyebabkan perusahaan terkadang mengambil jalan pintas (*illegal*) yaitu *fraud*.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Determinan Kecurangan Laporan Keuangan Melalui *Fraud Triangle* (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Sektor

Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI periode 2018-2021)”).

B. Batasan Penelitian

Dari identifikasi tersebut, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut, dalam penelitian ini peneliti berfokus pada Determinan Kecurangan Laporan Keuangan Melalui *Fraud Triangle* (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI periode 2018-2021).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah stabilitas keuangan berpengaruh terhadap pendeteksi kecurangan laporan keuangan?
2. Apakah tekanan eksternal dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah efektifitas pengawasan dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan?
4. Apakah rasionalisasi dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai adanya hubungan antara:

1. Untuk mengetahui apakah stabilitas keuangan berpengaruh

terhadap pendeteksi kecurangan laporan keuangan?

2. Untuk mengetahui apakah tekanan eksternal dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan?
3. Untuk mengetahui apakah efektifitas pengawasan dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan?
4. Untuk mengetahui apakah rasionalisasi dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya:

1. Dapat menambah wawasan bagi mahasiswa secara umum dan khususnya bagi mahasiswa akuntansi mengenai prospek dari profesi *Fraud Triangle* ini yang semakin diperlukan guna meminimalisir kecurangan laporan keuangan, khususnya dalam cabang bidang studi auditing.
2. Memberikan wawasan kepada investor agar lebih teliti dan jeli terkait dengan kemungkinan kecurangan laporan keuangan pada suatu perusahaan, agar investasi dapat dilakukan di perusahaan yang tepat.
3. Menambah pengetahuan masyarakat terkait fenomena *fraud* yang ada dan bagaimana cara mendeteksi dan mencegahnya.
4. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk perbaikan penelitian di masa mendatang.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan ini terbagi menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri atas materi-materi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, keterbatasan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi landasan teori dan kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara variable penelitian serta hipotesis penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, penentuan sampel penelitian, definisi operasional variabel penelitian dan teknik analisa data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh. Sejarah singkat objek penelitian, deskripsi data penelitian, deskripsi data variabel, analisis hasil penelitian dan pembahasannya.

Bab V Simpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran.